

TANTANGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MINANGKABAU DI NAGARI/DESA SIJUNJUNG, KABUPATEN SIJUNJUNG

Tetti Eka Purnama¹, Zaky Farid Luthfi²

^{1,2} Departemen Ilmu Sosial, FIS, Universitas Negeri Padang

email tetipurnama@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini dimana mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang belum ada pemimpin Nagari/Desa Sijunjung yang dipimpin oleh seorang perempuan. Tujuan penelitian ini mengungkap tantangan kepemimpinan perempuan di nagari/desa yang dihambat oleh beberapa faktor, baik itu faktor budaya maupun faktor lainnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di nagari/desa sijunjung, kabupaten sijunjung, sumatera barat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Hasil menunjukkan bahwa perempuan di nagari sijunjung belum dapat diterima oleh masyarakat secara luas bila dijadikan seorang pemimpin. Faktor penghambat belum adanya pemimpin perempuan yaitu faktor teologis, sosiologis serta historis. Kepemimpinan perempuan di nagari/desa sijunjung akan diterima jika faktor-faktor tersebut bisa di ubah dan ditinjau kembali, sehingga perempuan dapat diterima sebagai pemimpin di nagari/desa.

Kata kunci:

Kepemimpinan, Perempuan, Nagari, Minangkabau

ABSTRACT

The background of this research is that from 1945 until now there has been no leader of the Nagari/Village of Sijunjung led by a woman. The aim of this research is to reveal the challenges of women's leadership in nagari/villages which are hampered by several factors, both cultural and other factors. The research uses qualitative methods with a case study approach. This research was conducted in Nagari/Sijunjung village, Sijunjung district, West Sumatra. Data was collected through interviews, observation and documentation. Data were analyzed using data triangulation techniques. The results show that women in Nagari Sijunjung have not been widely accepted by society as leaders. The inhibiting factors for the lack of female leaders are theological, sociological and historical factors. Women's leadership in the nagari/village of Sijunjung will be accepted if these factors can be changed and reviewed, so that women can be accepted as leaders in the nagari/village.

Keywords:

leadership, womens, Nagari Minangkabau

Pendahuluan

Penelitian tentang kepemimpinan perempuan dalam lembaga pemerintahan terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya representasi gender yang seimbang dalam politik dan pemerintahan. Penelitian dapat mengeksplorasi hambatan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan yang ingin terlibat dalam politik dan mencapai posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan. Ini termasuk isu-isu seperti stereotip gender, perbedaan dalam pendanaan kampanye, dan ketidaksetaraan akses ke jaringan politik. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan sudah diberikan jaminan termasuk dibidang pemerintahan dan hukum dan sudah ada pada UUD 1945, Pasal 27 (1), yang menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya”. (Artina, 2016)

Dari hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Gabbryel Orlando Purba tentang “Peranan Keterwakilan perempuan Dalam Kinerja Keanggotaan DPRD Hasil Pemilu Legislatif 2019 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat”, dapat disimpulkan bahwa peranan keterwakilan perempuan sudah mengemban sebagai anggota DPRD perempuan dengan baik, anggota perempuan DPRD kota Pontianak terlibat aktif terhadap kebutuhan hak-hak masyarakat meskipun dibawah 30%, kehadiran dalam kinerja sudah bisa meningkatkan kualitas gender dalam laki-laki. (Gabbryel, 2023)

Kajian kepemimpinan perempuan di Indonesia penting dan menarik dikaji, hal ini dikarenakan terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia (Karim, 2020). Kepemimpinan perempuan berperan besar agar hak-hak perempuan bisa terpenuhi serta tidak kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Namun pada praktiknya kepemimpinan perempuan di Indonesia masih dianggap sesuatu hal yang tabu, dikarenakan masih banyak dari masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan bahwa yang bisa dan layak untuk menjadi seorang pemimpin tersebut adalah laki-laki. Begitu juga yang terjadi di daerah minangkabau, masyarakat minangkabau masih belum bisa mempercayai seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Kepemimpinan perempuan dari sudut adat Minang sendiri, ada kesan paradoksal pada peranan perempuan lokal, walaupun masyarakat minangkabau menganut adat matrilineal, yakni menarik garis keturunan ibu dan perempuan diakui memiliki kekuasaan atas harta pusaka dan anak tetapi perempuan lokal pada dasarnya tetap ter subordinasi oleh budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat (Iskandar, 2023). Sistem matrilineal menjadi pembeda posisi perempuan di minangkabau dibandingkan suku-suku lainnya di Indonesia. Bahkan suku minangkabau memiliki kedudukan sebagai bundo kanduang, yang berperan sebagai pengontrol kekuasaan dan harus dilibatkan di dalam berbagai keputusan musyawarah (Purnama, 2020). Meskipun kedudukan bundo kanduang bukan institusi formal, namun pengaruhnya sangat besar dalam politik masyarakat minangkabau (putri dkk, 2022).

Sejarah historis kepemimpinan perempuan telah terjadi sebelum Indonesia merdeka, seperti Martha Christina Tiahahu dari Maluku, Cut Nyak Meutia dari Aceh, Cut Nyak Dien dari Aceh, Raden Ajeng Kartini dari Jepara, Jawa Tengah, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Rohana Kuddus dari Padang, Sumatra Barat, Maria Walanda Maramis dari Minahasa, Sulawesi Utara, Siti Manggopoh dari Manggopoh, Agam, Sumatra Barat, HR. Rasuna Said dari Maninjau, Agam, Sumatra Barat, Fatmawati Soekarno dari Bengkulu, Nyi Ageng Serang, Opu Daeng Risadju dari Sulawesi Selatan, Laksamana Malahayati dari Aceh, Siti Hartinah dari Surakarta, Jawa Tengah, Nyai Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, Ratu Nahrasiyah dari Kerajaan Samudera Pasai dan Sultanah Safiatuddin Syah dari Aceh (Fuadi, 2021).

Perempuan juga memiliki peran diberbagai etnis dan suku di Indonesia. Di Sulawesi Utara, kepemimpinan perempuan tidak mengalami banyak hambatan, dikarenakan faktor budaya yang egaliter (Lotulung dan Mulyana, 2018). Perempuan menentu untuk kebijakan masa depan. Studi kepemimpinan di Tangerang, kepemimpinan perempuan dianggap membawa perubahan dan memiliki karakteristik yang membedakan dengan kepemimpinan laki-laki dan secara rill dilapangan bisa menerima masukan dari masyarakat yang melahirkan sebuah tindakan dalam pemecahan masalah (Prastio dkk, 2021). Kepemimpinan perempuan Kabupaten Simalungun Simalungun, Sumatera Utara memprihatikan karena keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik sangat sulit dilakukan karena memiliki rintangan sejarah, budaya, dan rendahnya posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam partai (Sianipar dan Hanita, 2019).

Penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam

kepemimpinan perempuan, baik itu faktor sosilologis, historis dan politis. Untuk itu penelitian tentang hambatan dan tantangan kepemimpinan perempuan penting dan menarik untuk dilakukan. Penelitian itu bertujuan untuk mengungkap tantangan dan hambatan kepemimpinan perempuan pada suku minangkabau di Nagari/Desa Sijunjung, Kabupaten Siujunjung, Sumatera Barat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk menggambarkan kejadian dari individu atau kelompok yang sama (Creswell, 2015). Metode ini menitikberatkan pada suatu kasus yang khusus yang dalam hal ini tantangan kepemimpinan perempuan minangkabau di Nagari/Desa Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Subjek pada penelitian ini adalah perangkat nagari meliputi, wali nagari, bundo kanduang, ninik mamak, alim ulama dan masyarakat nagari sijunjung. Teknik pengambilan sample informen dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu mengumpulkan informan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan informan pada proses wawancara dan informan dari kegiatan FGD bisa dilihat dari tabel :

Nama-Nama Informan Dari Proses Wawancara :

No	Nama	Lembaga / Instansi
1	Effendi	Wali Nagari di Nagari Sijunjung
2	Efni Ramayanti	Bundo Kandung Nagari Sijunjung
3	Jhon Iskandar	Kepala Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
4	Nurhaiti	Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
5	M. Datuak Penghulu Besar	Ninik Mamak
6	A.Khatib Suanaro	Ninik Mamak
7	Bujisar	Alim Ulama
8	Pardinand Laksama	Ketua Pemuda
9	Mai Santi	Masyarakat/Pedagang

Nama Informan Dari Kegiatan FGD :

No	Nama	Instansi/Lembaga
1	Efni Ramayanti	Bundo Kandung Nagari Sijunjung
2	Yasnidar Wahap	Dewan Pembina Organisasi Bundo Kandung
3	Jainar	Masyarakat/Mantan Bundo Kandung
4	Nurhaiti	Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
5	Rita Kusumadewi	Masyarakat/Guru
6	Fitria	Masyarakat/Ibu Rumah Tangga
7	Mai Santi	Masyarakat/Pedagang
8	Upik Ambo	Masyarakat/Petani
9	Pardinand	Ketua Pemuda Nagari Sijunjung
10	Zulherman	Masyarakat/Mantan Kajor Kp. Berlian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa, observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD. Observasi dilakukan peneliti di kantor nagari sijunjung. Peneliti mengambil peran dan berpartisipasi dalam subjek yang akan diteliti (Yin, 2015). Peneliti

menggali informasi secara mendalam menggunakan wawancara yang instrumennya telah disiapkan sebelumnya. Peneliti meminta informan untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri tanpa ada intervensi. Tujuan wawancara mendalam yaitu untuk menggali informasi yang detail mengenai tantangan yang dihadapi perempuan minangkabau untuk menjadi seorang pemimpin. FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan kepada informan untuk menentukan peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari dilakukan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weakness/kelemahan, Opportunities/kesempatan ataupun peluang dan Threats/ancaman). Pada penelitian dilakukan beberapa tahapan, tahap pralapangan, tahapan kegiatan lapangan dan tahap analisis data. Penelitian dilakukan di Nagari/Desa Sijunjung.

Proses analisis data melakukan telaah terhadap fenomena-fenomena yang diamati secara keseluruhan, maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena tersebut. Teknik tersebut meliputi reduksi, klasifikasi dan model data. Reduksi yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperlukan dan sebagai pelengkap. Klasifikasi yaitu, mengelompokkan satu data dengan tema yang sama. Model data menggunakan teknik analisis SWOT alat yang dipakai untuk menyusun tantangan kepemimpinan perempuan minangkabau di Nagari/Desa Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Perempuan Minangkabau Dalam Masyarakat di Nagari/Desa Sijunjung

Masyarakat minangkabau dalam hal ini Nagari/Desa Sijunjung menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu posisi perempuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat minangkabau melambangkan peran perempuan dan kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan laki-laki dengan filosofi Limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi, sumarak kampuang pamenan nagari, yang berarti perempuan memiliki peranan penting di dalam rumah gadang. (Idris, 2010)

Dalam wawancara informan menjelaskan bahwa

“Kaum perempuan dalam Nagari/Desa Sijunjung diartikan sebagai seorang bundo kanduang. Seorang kaum perempuan di sebuah rumah gadang memiliki fungsi sebagai penghuni rumah dan penjaga harta pusako”.

Hal ini dikarenakan perempuan adalah pewaris harta pusaka baik berupa tanah, rumah dan pusaka lainnya sehingga dia harus menjaga keberlangsungan hidup keluarganya. Secara teoritis budaya minangkabau menempatkan posisi perempuan pada kedudukan yang tinggi, namun pada kenyataannya perempuan minangkabau kalah berkompetensi dengan laki-laki dalam perihal kepemimpinan (Helfi, 2015).

Perempuan dalam masyarakat Minangkabau yang melambangkan peran dan kedudukannya yang tinggi, yang tidak ditemui pada laki-laki Minang seperti Limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi, sumarak kampuang pamenan nagari dan lain-lain. (Latief, 2002: 80). Perempuan juga diartikan sebagai bundo kanduang yaitu sebagai pemimpin perempuan di minangkabau sebagaimana diungkapkan oleh informan dalam hasil wawancara. Kedudukan perempuan dalam masyarakat minangkabau setidaknya memiliki tiga peran utama. Pertama sebagai bundo kanduang bundo kandung yang berarti ibu sejati yang mempunyai sifat keibuan dan kepemimpinan. Kedua, dalam sistem kekerabatan perempuan yang mewarisi dan mewariskan keturunan memakai suku dan adat dari seorang ibu. Ketiga, sebagai pemilik suku, ulayat, pusako, kekayaan, rumah, anak dan kaum.

Kepemimpinan Perempuan di Nagari/Desa Sijunjung

Perempuan Minangkabau masih dianggap sosok yang lemah, halus dan emosional, sedangkan laki-laki sosok yang gagah, berani dan rasional pandangan ini mengkabatkan perempuan minangkabau jarang tampil sebagai pemimpin, sebagaimana yang ungkapkan oleh informan dari hasil wawancara. Perempuan Minangkabau juga dianggap lemah dalam pengetahuan adat dan budaya, yang juga diungkapkan oleh informan dan hasil wawancara.

Tantangan kepemimpinan perempuan minangkabau di Nagari/Desa Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pertama masyarakat beranggapan perempuan kaum yang lemah yang harus dilindungi oleh laki-laki. Kedua, prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”, dimana dalam ajaran Agama Islam dikatakan laki-laki adalah seorang pemimpin atau imbangi perempuan, sehingga pandangan masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Ketiga, perempuan minangkabau masih lemah dalam pengetahuan adat dan budaya minangkabau. Keempat, perempuan minangkabau di nagari/desa sijunjung belum memiliki keberanian untuk menjadi pemimpin.

Peluang Perempuan Minangkabau Menjadi Pemimpin

Kesetaraan gender menunjukkan kesamaan hak perempuan dalam kehidupan. Perempuan tidak lagi dipandang sosok lemah, yang berada dibarisan belakang, perempuan bisa tampil sebagai pemimpin yang didukung dengan berbagai kebijakan tentang kesetaraan gender. Adanya kesamaan hak mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. (Sahban, 2016). Dalam wawancara informan menjelaskan bahwa.

“Seorang perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Adanya dasar hukum dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin”.

Sistem pemerintahan demokrasi yang menghargai HAM yang dipakai oleh Negara Indonesia, didukung oleh aturan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menjelaskan adanya persamaan hak dan kewajiban untuk laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan, artinya perempuan juga memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, yang juga diungkapkan oleh informan dan hasil wawancara..

Peran bundo kanduang yang melekat pada perempuan minangkabau, mempunyai makna mendalam (Davis, 2007). Perempuan minangkabau digambarkan sebagai ibu yang ideal, berwibawa, arif dan bijaksana, untuk ditiru dan memakai rasa serta periksa. Dalam wawancara informan menjelaskan bahwa.

“Perempuan memiliki peluang untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah nagari (wali nagari) termasuk di Nagari Sijunjung. Dengan sikap keibuan yang berwibawa, arif dan bijaksana yang dimiliki oleh kaum perempuan tersebut bisa dijadikan sebagai bekal bagi kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Dari sejarah pagaruyuang dimana kerajaan pagaruyuang pertama kali dipimpin oleh seorang kaum perempuan. Dari sejarah tersebut dapat kita lihat bahwa nagari minangkabau memberi peluang kepada perempuan untuk menjadi seorang pemimpin”.

Perempuan minangkabau di Nagari/Desa Sijunjung memiliki peluang untuk tampil menjadi pemimpin, diantaranya Pertama, kebijakan tentang HAM di Negara Indonesia yang memberikan peluang yang sama untuk laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin. Kedua, program kerja yang dibuat oleh lembaga pemberdayaan perempuan dalam mensterilkan perempuan. Ketiga, sikap yang lebih disiplin dan rajin yang dimiliki menjadi bekal menjadi

pemimpin. Keempat, perempuan juga memiliki pengetahuan adat budaya nagari. Kelima, karakter keibuan, arif dan bijaksana yang mencerminkan karakter seorang bundo kanduang. Keenam, secara historis pagaruyung pertama kali dipimpin oleh seorang perempuan.

Hambatan Perempuan Minangkabau Menjadi Pemimpin

Perempuan minangkabau menghadapi banyak kendala untuk menjadi seorang pemimpin, dimulai dari hambatan budaya dan agama maupun secara fisik, teologis, sosial budaya, sikap pandang dan hambatan historis. (Idris, 2010) Pandangan masyarakat tentang kepemimpinan perempuan menjadi hambatan perempuan untuk menjadi pemimpin di Nagari/Desa Sijunjung yang diungkapkan oleh informan dan hasil wawancara.

“Beberapa bentuk hambatan yang dihadapi oleh kaum perempuan Nagari Sijunjung untuk menjadi seorang pemimpin nagari/desa (wali nagari) diantaranya : 1) Bentuk adat istiadat yang masih sangat kental dengan prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”, dimana dalam agama islam dijelaskan bahwa yang menjadi seorang pemimpin ataupun imam itu adalah kaum laki-laki. Dengan penjelasan tersebut, kaum adat dan masyarakat masih lebih percaya kepada laki-laki untuk memimpin, termasuk pemimpin nagari. 2) Kaum perempuan Nagari Sijunjung masih belum memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menonjolkan diri dan menunjukkan kemampuan mereka kepada pihak masyarakat maupun pemerintah”.

Faktor sikap pandang dan hambatan fisik dari kaum perempuan itu sendiri juga menjadi penghambat perempuan di Nagari/Desa Sijunjung menjadi pemimpin. Dalam wawancara informan menjelaskan bahwa.

“Pandangan masyarakat tentang perempuan yaitu orang yang berada di rumah, bukan berada di luar rumah. Keadaan fisik kaum perempuan juga menjadi penghambat bagi kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Kodrat perempuan yang harus menjadi seorang ibu, dimana nantinya dia akan hamil dan menyusui, ketika saat itulah akan mengganggu perempuan dalam beraktifitas. Sikap tidak berani dan tidak percaya diri pada diri untuk menunjukkan kemampuan dan kepercayaannya”.

Pandangan perempuan dalam Islam juga menjadi hambatan perempuan menjadi pemimpin. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori ketika mendapatkan berita masyarakat Persi memilih putri Kisra sebagai pemimpin yang artinya apabila suatu kaum menyerahkan urusannya kepada perempuan maka rusaklah kaum itu (Novianti, 2008). Dalam wawancara informan menjelaskan bahwa.

“Salah satu hambatan seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam lembaga pemerintahan yaitu saat mereka telah menjadi seorang istri dan ketika perempuan tersebut tidak bisa mendapatkan dukungan dan izin dari suami untuk bisa ikut serta di dalam sebuah lembaga pemerintahan tersebut.”

Hasil wawancara dan kegiatan FGD yang dilakukan peneliti, peluang dan hambatan kepemimpinan perempuan di Nagari/Desa Sijunjung dilihat dari dalam dan luar diri perempuan minangkabau tersebut. Peluang perempuan minangkabau menjadi pemimpin, pertama, dilihat dari kebijakan Negara Indonesia tentang persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin, kedua, kedudukan bundo kanduang pada perempuan minangkabau, dan ketiga bentuk kekerabatan matrilineal, kekuasaan ada di tangan perempuan minangkabau. Sedangkan hambatan perempuan minangkabau menjadi pemimpin di Nagari/Desa Sijunjung. Pertama, menurut faktor sosial budaya dan teologis perempuan itu diciptakan untuk laki-laki. Kedua, faktor historis, dinagari/desa Sijunjung belum pernah dipimpin oleh perempuan. Ketiga, faktor sikap pandang, kepercayaan masyarakat kepada perempuan untuk menjadi pemimpin masih rendah. Hambatan ini membuat peluang perempuan minangkabau menjadi

pemimpin di Nagari/Desa Sijunjung semakin kecil.

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Perempuan Minangkabau Menjadi Pemimpin

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan perempuan minangkabau menjadi pemimpin dalam lembaga pemerintahan yang diungkapkan oleh informan dan hasil wawancara.

“Pertama, untuk merubah pandangan para kaum adat dan masyarakat, bisa dilakukan berbagai bentuk sosialisasi dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Upaya yang kedua yaitu memperlihatkan kemampuan yang kaum perempuan miliki untuk menjadi seorang pemimpin dan meyakinkan kaum adat dan para masyarakat kalau kaum perempuan tersebut juga bisa dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin nagari/desa (wali nagari). Dan upaya yang ketiga yaitu mengikuti berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di nagarian” .

Perempuan minangkabau memiliki sebuah lembaga pemberdayaan perempuan yang berfungsi sebagai penampung aspirasi perempuan minangkabau juga menjadi salah satu upaya dalam mengatasi hambatan perempuan minangkabau menjadi pemimpin. Dalam wawancara informan menjelaskan bahwa.

“Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan perempuan untuk membantu kaum perempuan Nagari/desa Sijunjung agar bisa menjadi seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pemerintahan yaitu dengan mengadakan berbagai sosialisasi kepada kaum perempuan yang ada di Nagari/Desa Sijunjung dengan cara menunjuk kader-kader pemberdayaan perempuan pada setiap jorong, dengan tujuan supaya kaum perempuan tersebut bisa aktif di dalam sebuah lembaga pemerintahan. Dengan menumbuhkan rasa berani dan percaya diri terhadap kaum perempuan tersebut, bisa menggali kemampuan yang ada dalam diri mereka”

Lembaga pemberdayaan perempuan di Nagari/Desa Sijunjung, melakukan beberapa bentuk upaya agar perempuan minangkabau bisa menjadi pemimpin, diantaranya; pertama, memberikan sosialisasi untuk menumbuhkan keberanian kepada perempuan minangkabau untuk menjadi pemimpin. Kedua, lembaga pemberdayaan perempuan membuat program kerja dan organisasi serta kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa berani, percaya diri dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh perempuan minangkabau.

Hasil kegiatan FGD, bentuk upaya dalam mengatasi hambatan perempuan menjadi pemimpin di Nagari/Desa Sijunjung. Pertama, menumbuhkan rasa berani dan percaya diri perempuan minangkabau melalui kegiatan organisasi nagari. Kedua, memberikan pemahaman dan kesadaran melalui beberapa bentuk pendidikan dan pelatihan. Ketiga, mendapatkan kepercayaan dari tokoh adat dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di nagari/desa untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan minangkabau. Keempat, melakukan pendekatan kepada kaum adat dan masyarakat melalui sosialisasi tentang kepemimpinan perempuan. Kelima, memberikan kesetaraan perempuan melalui melalui program kegiatan lembaga pemberdayaan perempuan. Keenam, melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa faktor fisik dan peran perempuan di rumah tidak menjadi penghalang perempuan minangkabau menjadi pemimpin di Nagari/Desa Sijunjung.

Upaya dalam mengatasi hambatan perempuan minangkabau menjadi pemimpin di Nagari/Desa Sijunjung dilakukan melalui analisis SWOT dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang/kesempatan dan ancaman memperhatikan empat alternatif SO (Strategi ini memanfaatkan seluruh kekuatan dengan memperhatikan peluang), alternatif WO (memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan peluang), alternatif ST (memanfaatkan kekuatan dengan memperhatikan ancaman) dan alternatif WT (memanfaatkan kelemahan

dengan memperhatikan ancaman). Untuk lebih jelasnya dapat dari tabel matriks SWOT berikut

Tabel 1. Analisis SWOT

		Kekuatan (Strengths-S)	Kelemahan (Weakness-W)
		1. Sikap bundo kanduang yang dimiliki oleh perempuan minang 2. Sifat rajin, teliti, rapi bersih, dan hati-hati yang dimiliki perempuan. 3. Daerah minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal. 4. Perempuan memiliki kemampuan dan kesempatan dalam pemerintahan untuk menjadi pemimpin. 5. Perempuan memiliki kemampuan menjadi pemimpin. 6. Memiliki nama dan latar belakang keluarga yang baik 7. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menjadi pemimpin dalam berbagai bentuk usaha 8. Memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin.	1. Perkembangan potensi diri perempuan terhalang oleh pendapat masyarakat yang hanya mampu tugas-tugas rumah tangga. 2. Perempuan minangkabau di Nagari/Desa Sijunjung tidak memiliki keberanian dan tidak percaya diri menjadi pemimpin di nagari/desa. 3. Keadaan fisik hami pada perempuan dapat mengganggu dalam peran pemimpin. 4. Perempuan minangkabau masih belum memahami tentang adat istiadat. 5. Masih ada perempuan minangkabau yang tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk menjadi pemimpin.
Kesempatan (Opportunities-O)	Strategi (Memanfaatkan kekuatan memperhatikan kesempatan)	SO dengan	Strategi WO (Memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan kesempatan)
1. Sistem demokrasi yang memberikan hak pada setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. 2. Tidak larangan dari pemerintah untuk perempuan menjadi pemimpin 3. Sudah banyak dari perempuan menjadi pemimpin dalam lembaga pemerintahan 4. Tidak ada kebijakan yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. 5. Perempuan selalu diikutsertakan dalam	1. Memanfaatkan cerita pagaruyung digunakan sebagai inspirasi untuk membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin, dan saat ini tidak ada larangan dari pemerintah untuk perempuan menjadi pemimpin. 2. Memanfaatkan sikap keibuan yang berwibawa, arif dan bijaksana yang dimiliki perempuan menjadi		1. Dilakukan pengembangan potensi perempuan minangkabau untuk merubah pandangan masyarakat, yang memandang perempuan hanya cocok tugas rumah tangga dengan menunjukkan bahwa telah banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin. 2. Pengembangan potensi diri perempuan dengan menggunakan lembaga pemberdayaan perempuan yang sebagai tempat untuk menampung aspirasi dan

<p>kegiatan kenagarian</p> <p>6. Adanya kebijakan yang mengatur bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama menjadi pemimpin.</p> <p>7. Adanya lembaga pemberdayaan perempuan di Nagari/Desa sebagai organisasi penampung aspirasi perempuan.</p>	<p>3. Memanfaatkan sikap rajin, teliti, rapi, bersih, hati-hati dan cerdas yang dimiliki perempuan menjadi modal untuk menjadi pemimpin dan ditunjukkan pada setiap kegiatan di nagari/desa. Dengan kebijakan yang berlaku, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi, termasuk menjadi pemimpin.</p> <p>4. Menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yang memberikan kekuasaan pada perempuan minangkabau untuk bisa berhasil menjadi pemimpin.</p> <p>5. Memanfaatkan dan melestarikan sifat-sifat bundo kanduang sebagai bekal untuk perempuan minangkabau menjadi pemimpin yang baik, karena bagaimanapun tidak ada kebijakan yang melarang perempuan menjadi pemimpin.</p> <p>6. Memanfaatkan kemampuan yang dimiliki perempuan untuk merubah pandangan masyarakat tentang pemimpin perempuan.</p> <p>7. Menggunakan dan memanfaatkan nama dan latar belakang keluarga untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.</p> <p>8. Menggunakan dan memanfaatkan berbagai macam bentuk usaha untuk menunjukkan</p>	<p>keinginan perempuan.</p> <p>3. Menumbuhkan dan mengembangkan keberanian dan percaya diri perempuan minangkabau dengan ikut serta organisasi dan kegiatan kenagarian/desa</p> <p>4. Menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri perempuan minangkabau untuk menjadi pemimpin dengan menunjukkan adanya kebijakan yang mengatur bahwa adanya persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin.</p> <p>5. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa keadaan fisik perempuan tidak menjadi penghalang dan mengganggu perempuan menjadi pemimpin dengan menunjukkan bahwa telah banyaknya perempuan yang berhasil menjadi pemimpin dalam sebuah lembaga atau organisasi.</p> <p>6. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa keadaan fisik perempuan tidak menjadi penghalang dan mengganggu perempuan menjadi pemimpin dengan menunjukkan ikut serta dalam berbagai kegiatan nagari.</p> <p>7. Ikut serta dalam setiap kegiatan nagari/desa perempuan minangkabau bisa mempelajari tentang adat dinagari karena tidak ada larangan dari pemerintah untuk menjadi pemimpin, karena Indonesia memakai sistem pemerintahan yang demokrasi</p> <p>8. Upaya menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan keberanian perempuan untuk bisa tampil sebagai</p>
---	---	--

	kemampuan dalam merubah pandangan masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.	9. Upaya dan kemampuan dan keberanian perempuan untuk menjadi pemimpin, karena tidak ada kebijakan melarang perempuan menjadi pemimpin.	
Ancaman (Threats-T)	Strategi (Memanfaatkan Kekuatan Memperhatikan Ancaman)	ST Dengan	WT (Memanfaatkan Kelemahan Dengan Memperhatikan Ancaman)
1. Perempuan minangkabau belum memiliki kepercayaan masyarakat untuk menjadi pemimpin nagari/desa.	1. Sikap keibuan yang berwibawa, arif, dan bijaksana yang dimiliki oleh kaum perempuan dapat menjadi bekal bagi mereka dalam mendapatkan rasa percaya dari para ninik mamak dan pemangku adat untuk menjadi pemimpin nagari. Meskipun ada pandangan bahwa perempuan tidak mampu menjadi pemimpin, sikap keibuan tersebut dapat mengubah persepsi tersebut.		1. Dalam rangka mengubah pandangan masyarakat yang cenderung memandang perempuan hanya sebagai penjaga rumah tangga, penting untuk tidak membiarkan potensi diri kaum perempuan terhambat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mempercayai kaum perempuan sebagai pemimpin, meskipun saat ini kepercayaan masyarakat masih lebih cenderung kepada kaum laki-laki dalam peran kepemimpinan.
2. Pendapat masyarakat berada di rumah yang tugasnya menjaga dan melayani keluarga.			2. Penting untuk tidak membiarkan potensi diri kaum perempuan terhambat oleh pandangan masyarakat, sehingga mereka tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang diciptakan semata-mata untuk kaum laki-laki.
3. Pandangan perempuan diciptakan untuk laki-laki adalah bias gender yang perlu dirubah.			3. Dengan menumbuhkan dan mengembangkan rasa berani dan percaya diri pada diri kaum perempuan sebagai pemimpin nagari/desa (wali nagari), diharapkan mereka dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Meskipun selama ini banyak masyarakat hanya mempercayai laki-laki
4. Perempuan minangkabau tidak mendapatkan dukungan dari kaum adat dan para ninik mamak untuk menjadi pemimpin nagari.	2. Memanfaatkan sifat rajin, teliti, rapi, bersih, hati-hati, dan cerdas yang banyak dimiliki oleh perempuan, dapat menggunakan modal ini untuk menjadi pemimpin nagari yang baik dan bersih. Dukungan dari para ninik mamak dan pemangku adat akan tercapai jika kaum perempuan menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang baik.		
5. Perempuan minangkabau tidak mendapatkan kepercayaan dari kaum adat dan ninik mamak untuk menjadi pemimpin.			

-
3. Dengan memanfaatkan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, kekuasaan berada di tangan ibu (perempuan) sesuai dengan adat, diharapkan pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan yang selama ini dianggap hanya berperan di dalam rumah tangga sebagai penjaga dan pelayan keluarga dapat berubah.
 4. Memanfaatkan dan melestarikan sifat bundo kanduang seperti kejujuran, kecerdikan, kefasihan dalam mendidik, dan memiliki rasa malu yang dimiliki oleh kaum perempuan Minangkabau dapat menjadi bekal bagi mereka dalam menjadi pemimpin yang baik. Dukungan dari para ninik mamak dan pemangku adat dapat diperoleh jika kaum perempuan menunjukkan sifat-sifat tersebut dalam kepemimpinan nagari.
 5. Dengan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh kaum perempuan untuk menjadi pemimpin dalam lembaga pemerintahan, diharapkan dapat merubah pandangan sebagai pemimpin nagari/desa (wali nagari), penting untuk mengubah pandangan tersebut melalui peningkatan rasa percaya diri kaum perempuan.
 4. Dengan menumbuhkan dan mengembangkan rasa berani dan percaya diri pada diri kaum perempuan sebagai pemimpin nagari/desa (wali nagari), diharapkan mereka dapat memperoleh kepercayaan dari para ninik mamak dan pemangku adat. Hal ini penting agar kaum perempuan dapat menjadi pemimpin nagari dengan dukungan dan pengakuan dari pihak yang memiliki peran penting dalam adat dan tradisi masyarakat.
 5. Tidak membiarkan keadaan faktor fisik, seperti perubahan fisik yang terjadi pada kaum perempuan saat hamil dan menyusui, mengganggu potensi mereka sebagai pemimpin. Hal ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada kaum perempuan dalam menjalankan peran sebagai pemimpin, termasuk sebagai pemimpin nagari (wali nagari).
 6. Penting untuk tidak membiarkan perubahan fisik, seperti kehamilan dan menyusui, menghalangi kaum perempuan dalam peran mereka sebagai pemimpin. Hal ini penting agar kaum perempuan tidak hanya dipandang sebagai individu yang terbatas pada tugas-tugas rumah tangga, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di luar rumah.
 7. Kaum perempuan berusaha aktif dalam kegiatan adat di nagari untuk mempelajari
-

- masyarakat terhadap perempuan yang selama ini sering dipandang hanya sebagai orang yang berada di dalam rumah tangga dengan tugas menjaga dan melayani keluarga.
6. Memanfaatkan nama dan latar belakang keluarga yang baik dalam pandangan masyarakat dapat membantu mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada kaum perempuan sebagai pemimpin nagari. Meskipun masih ada kecenderungan masyarakat untuk mempercayai kaum laki-laki sebagai pemimpin nagari, memanfaatkan faktor tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam memperoleh dukungan untuk kaum perempuan dalam peran kepemimpinan.
7. Dengan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam berbagai bentuk usaha, mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka kepada masyarakat dan memperoleh kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Hal ini penting agar kaum perempuan tidak terus dipandang hanya sebagai makhluk yang diciptakan semata-
- dan memahami adat istiadat yang berlaku. Hal ini bertujuan agar mereka mendapatkan dukungan dari para ninik mamak dan pemangku adat dalam perjalanan mereka menjadi pemimpin nagari.
8. Kaum perempuan perlu menumbuhkan kemampuan dan keberanian mereka agar bisa menjadi pemimpin di nagari. Hal ini bertujuan untuk mengubah pandangan negatif para ninik mamak dan pemangku adat yang meragukan kemampuan kaum perempuan sebagai pemimpin nagari/desa. Dengan demikian, kaum perempuan dapat memperoleh kepercayaan dari para ninik mamak dan pemangku adat untuk memimpin nagari/desa.
-

- mata untuk laki-laki.
8. Dengan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam berbagai bentuk usaha, mereka dapat menunjukkan potensi dan kemampuan mereka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat yang selama ini cenderung menganggap perempuan hanya sebagai orang yang berada di dalam rumah, dengan tugas utama menjaga dan melayani keluarga.
 9. Dengan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan serta memenuhi syarat-syarat dalam menjadi pemimpin di lembaga pemerintahan, kaum perempuan dapat berupaya mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi pemimpin nagari. Meskipun masyarakat masih cenderung mempercayai kaum laki-laki sebagai pemimpin nagari, penggunaan kemampuan dan pemenuhan syarat-syarat tersebut dapat menjadi langkah penting dalam mengubah persepsi tersebut.
-

Dari hasil analisis SWOT upaya dalam mengatasi hambatan perempuan menjadi

pemimpin di Nagari/Desa Sijunjung. Pertama, bentuk kekerabatan matrilineal (kekuasaan ditangan ibu/perempuan) yang dianut oleh masyarakat minangkabau. Kedua, pandangan masyarakat minangkabau tentang karakter perempuan minangkabau yang keibuan yang berwibawa, arif dan bijaksana menjadi modal untuk menjadi pemimpin. Ketiga, kebijakan pada pemerintahan Indonesia tentang persamaan hak perempuan dan laki-laki untuk menjadi pemimpin.

Hasil wawancara, FGD dan analisis SWOT yang dilakukan oleh peneliti, bentuk upaya dalam mengatasi hambatan perempuan menjadi pemimpin di Nagari/Desa Sijunjung. Pertama, dengan menumbuhkan, mengembangkan dan melestarikan sifat keperempuanan yang dimiliki oleh kaum perempuan Nagari/Desa Sijunjung, serta memiliki nama dan latar belakang keluarga yang baik, mereka memiliki bekal untuk menjadi pemimpin nagari sesuai dengan arti dan makna dari sebutan bundo kanduang yang sering dikaitkan dengan perempuan minang. Kedua, dengan ikut serta aktif dalam berbagai kegiatan pemerintahan nagari, dapat menumbuhkan rasa berani dan percaya diri, serta menumbuhkan potensi diri dan kemampuan perempuan minangkabau. Ketiga, pendekatan dan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat dan kaum adat bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan terhadap kepemimpinan perempuan didalam nagari.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat di Nagari/Desa Sijunjung memiliki pemahaman yang cukup tentang kedudukan perempuan dalam sistem adat minangkabau, mereka masih belum bisa menerima dan mempercayai perempuan sebagai pemimpin nagari. Kedudukan perempuan dalam masyarakat masih mengikuti sistem adat yang berlaku, namun pemimpin perempuan masih sulit diterima.

Terdapat peluang bagi kaum perempuan di Nagari/Desa Sijunjung untuk menjadi pemimpin nagari. Peluang ini dapat muncul baik dari faktor internal maupun eksternal, seperti persamaan hak dalam hukum negara dan sistem kekerabatan matrilineal dalam adat dan masyarakat minangkabau. Namun terdapat juga hambatan-hambatan yang berasal baik dari dalam diri maupun luar diri kaum perempuan, termasuk hambatan fisik, teologis, sosial budaya, sikap pandang dan faktor historis.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan strategi yaitu dengan cara memanfaatkan sebaik mungkin segala peluang yang ada dalam diri dan luar diri kaum perempuan itu sendiri, maka kaum perempuan itu bisa mengatasi segala hambatan yang dihadapinya untuk bisa menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah nagari. Dalam penelitian ini upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan memanfaatkan peluang yang ada dan berusaha mengatasi hambatan-hambatan. Perempuan minangkabau memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di Nagari/Desa.

Referensi

- Aba, A., Suryadi, K., & Matang, M. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 8(2), 9-20.
- Affandi, N. R. D., Hartawan, Y., & Al Aqilah, L. Z. (2022). GAYA KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN:(Studi Kualitatif Deskriptif dr. Hj. Cellica Nurrahadiana Sebagai Bupati Kabupaten Karawang Dari Perspektif Ilmu Komunikasi). *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 249-257.
- Akbar, K. (2019). Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan (Female Leadership) Di Nagari Sulit

- Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok Periode 2014-2020 (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Artina, Dessy. 2016. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019."
- Astuti, P., Afandi, M. A., & Listuani, R. H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *Jurnal Litbang Kebijakan*. Surabaya: Cakrawala, 13(2), 1-24.
- Davis, C. (1995). Hierarchy or complementarity? Gendered expressions of Minangkabau adat. *Indonesia Circle*, 23(67), 273-292.
- Fuadi, M. A. (2021). Kepemimpinan Perempuan: Peran Ratu Ageng terhadap Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2).
- Gabbryel Orlando Purba (2023). Peranan Keterwakilan Perempuan Dalam Kinerja Keanggotaan DPRD Hasil Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *IPDN*. <http://eprints.ipdn.ac.id/12241/>
- Helfi, H. (2015). Buruh Tani Wanita Panggilan Dan Eksistensinya Menurut Adat Minangkabau. *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 17(1), 84-100.
- Idris, N. (2010). Minat perempuan Minangkabau pada politik masih rendah. *Jurnal WACANA*, 13(2), 40012.
- Iskandar, I. (2023). Perempuan dan Demokrasi Lokal di Minangkabau. *Jurnal Ceteris Paribus*, 2(1), 46-55.
- Latief. 2002. *Etnis Dan Adat Minangkabau: Permasalahan Dan Masa depannya*. Bandung: Percetakan Angkasa.
- Lotulung, L. J., & Mulyana, D. (2018). Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 20(2), 138-144.
- Novianti, I. (2008). Dilema kepemimpinan perempuan dalam Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 3(2), 255-261.
- Nurwani Idris. 2010. Kedudukan Perempuan Dan Aktualisasi Politik Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. *Jurnal Masyarakat dan Politik Tahun 25, Nomor 2*: 108-116. <http://journal.unair.ac.id>
- Prastio, L. O., Abdillah, A., Nurlia, E., & Tati, T. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 103-114.
- Putri, D. K., & Hidayat-sardini, N. (2022). BUDAYA MATRILINEAL DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF DAERAH KOTA BUKITTINGI. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 351-364.
- Sahban, H. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 1(1), 56-71.
- Sianipar, T. M. E., & Hanita, M. (2019). Analisis Gaya kepemimpinan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Perspektif Ketahanan Politik di Daerah (Studi Kasus: Kepemimpinan Rospita Sitorus sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Simalungun). *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 2(2), 137-144.
- Sola, E. (2020). "BUNDO KANDUANG" MINANGKABAU Vs. KEPEMIMPINAN. *JURNAL SIPAKALEBBI*, 4(1), 346-359.